

Integrasi Konsep Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme

Oleh:

Moh. Rokib, Mahfida Inayati, Maimun

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

Email: rokibselamet19@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the integration of the concepts of religious moderation and multiculturalism as an approach in building social harmony in a diverse society. In an increasingly complex global context, especially in Indonesia, which is known for its religious, ethnic, and cultural plurality, religious moderation and multiculturalism are important strategies to prevent social conflicts and increase tolerance between religious communities. Through library research-based research, this study collects and analyzes literature from various academic sources, such as books, journals, and scientific articles that discuss both concepts theoretically and practically. This study found that religious moderation emphasizes the importance of a middle ground (wasatiyyah), which avoids extremism and radicalism in religion, while multiculturalism emphasizes acceptance and respect for cultural differences and beliefs. These two concepts share similarities in the principles of inclusivity, tolerance, and equality, which can be integrated within the framework of public policy, education, and social activities to strengthen national unity and global peace. The results of this research are expected to contribute to the development of policies that encourage social cohesion and answer the challenges of diversity in contemporary society. The integration of religious moderation and multiculturalism can be a solution to maintain a balance between religious identity and cultural diversity, as well as increase dialogue between different groups.

Keywords: *Religious Moderation, Multiculturalism, Tolerance, Inclusivity, Social Cohesion.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan pluralitas yang sangat tinggi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan sosial.¹ Berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa hidup berdampingan dalam satu wilayah yang luas. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut, tanpa memicu konflik atau perpecahan.² Dua konsep utama yang banyak dibicarakan dalam wacana menjaga persatuan di tengah keberagaman adalah moderasi beragama dan multikulturalisme.

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan pada jalan tengah dalam kehidupan beragama, menghindari ekstremisme dan radikalisme.³ Prinsip *wasatiyyah* atau moderasi ini telah diakui oleh banyak ulama dan tokoh agama sebagai cara

¹ Baginda Sitompul et al., "Peran Pendidikan Dalam Menjaga Keharmonisan Beragama Di Indonesia: Perspektif Pluralitas Agama," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 02 (2024): 3031–9498.

² Agus Munadlir, "Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural," *JPSD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 2, no. 2 (2016): 6.

³ Masti Yanto et al., "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023): 252–57, <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1343>.

terbaik untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang memiliki beragam keyakinan. Di tengah meningkatnya fenomena radikalisasi dan intoleransi agama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, moderasi beragama menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diterapkan. Moderasi beragama bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran agama dipraktikkan dengan cara yang menghargai hak-hak orang-orang atau kelompok lain yang memiliki pandangan atau kepercayaan yang tidak sama⁴.

Sementara itu, multikulturalisme adalah konsep yang menekankan penghargaan dan penerimaan terhadap keberagaman budaya dalam suatu masyarakat.⁵ Multikulturalisme muncul sebagai respon terhadap meningkatnya globalisasi dan migrasi yang menciptakan masyarakat yang semakin beragam. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme diharapkan menjadi jembatan dalam mengelola keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama.⁶ Melalui pendekatan multikultural, masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan, serta berkolaborasi untuk menciptakan keharmonisan sosial.

Kedua konsep ini memiliki banyak titik temu yang bisa diintegrasikan dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Moderasi beragama mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan sikap inklusif dalam beragama, sedangkan multikulturalisme menekankan pentingnya saling menghargai dan menghormati keragaman budaya serta keyakinan.⁷ Dengan demikian, pengintegrasian kedua konsep ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang sering muncul di tengah pluralitas masyarakat.

Dalam konteks kebijakan dan pendidikan, penggabungan antara moderasi beragama dan multikulturalisme dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum yang lebih inklusif serta pembentukan kebijakan publik yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan.⁸ Pemerintah dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mempromosikan kedua konsep ini melalui kebijakan yang bersifat preventif terhadap konflik berbasis agama dan etnis.

⁴ P Lubis, "Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison ...* 1, no. 1 (2024): 314–32.

⁵ Yusawinur Barella et al., "Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam: Membangun Kesadaran Dan Toleransi Dalam Keanekaragaman Budaya," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2028–39, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.476>.

⁶ Murzal, "Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SEKOLAH (Studi Terhadap Upaya Membina Karakter Siswa Di SMKN 1 Gerung Kec. Gerung Kab. Lombok Barat) Murzal," *Jurnal Kalam* 6, no. 2 (2018): 2338–41.

⁷ Aryanti Dwiyani, "Pendidikan Islam Multikultural Di Sekolah," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 68–78, <https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1586>.

⁸ Heni Maria et al., "Transformasi Sosial Melalui Lensa Teologi: Memahami Peran Agama Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Pada Konteks Kontemporer," *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 108.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep moderasi dalam beragama dan multikulturalisme, serta bagaimana penerapannya dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan. Dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai literatur akademis yang mendukung teori dan penerapan kedua konsep ini di berbagai konteks, khususnya di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme sebagai langkah strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

B. Pembahasan

1. Konsep Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme

Moderasi beragama atau *wasatiyyah* berasal dari istilah bahasa Arab yang berarti "pertengahan" atau "jalan tengah."⁹ Konsep ini merujuk pada pemahaman dan praktik beragama yang seimbang, tidak ekstrem, baik dalam konteks keyakinan, ritual, maupun hubungan sosial.¹⁰ Tujuan moderasi beragama untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di antara pemeluk agama yang berbeda dan umat beragama dengan menghindari sikap fanatik, radikal, maupun sekulerisme ekstrem.¹¹ Moderasi beragama didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti toleransi, keseimbangan, keadilan, dan sikap terbuka terhadap perbedaan.¹² Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa kehidupan beragama harus bersifat inklusif, dimana setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinan mereka.¹³ Hal ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip itu diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari dan dalam kebijakan publik.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim namun dengan keberagaman agama yang tinggi, menjadikan moderasi beragama sebagai sebuah kebutuhan penting.¹⁴ Pemerintah Indonesia telah mendorong konsep moderasi beragama

⁹ Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23.

¹⁰ Masti Yanto et al., "Pendidikan Karakter Berbasis Sistem Islamic Boarding School Multidisipliner Dalam Mempertahankan Kebudayaan Dan Moderasi Beragama," *Lentera Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 23, no. 1 (2024): 130–45.

¹¹ Nurul Faiqah and Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33, <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.

¹² Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

¹³ Ulva Hasdiana, "Epistemologi Hukum Islam," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.

¹⁴ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama, terutama melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan program-program sosial.¹⁵ Hal ini, akan dibahas berbagai kebijakan pemerintah dan program moderasi beragama yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi atau kebijakan yang menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya dalam masyarakat.¹⁶ Multikulturalisme bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua kelompok budaya memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan identitas mereka.¹⁷ Multikulturalisme menekankan pentingnya kesetaraan, pengakuan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan dalam hal budaya, agama, dan etnis dilihat sebagai kekayaan, bukan ancaman.¹⁸ hal ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar multikulturalisme, seperti non-diskriminasi, dialog antar budaya, dan inklusi sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip ini membantu mencegah konflik sosial.

Dengan lebih dari 300 etnis dan ribuan bahasa daerah, Indonesia merupakan salah satu negara paling beragam di dunia.¹⁹ Multikulturalisme telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan politik Indonesia, meskipun tantangan terkait intoleransi dan diskriminasi masih ada. Subbagian ini akan mengeksplorasi bagaimana multikulturalisme telah diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, seperti melalui pendidikan dan undang-undang anti-diskriminasi, serta peran lembaga adat dan komunitas lokal dalam menjaga keberagaman.

2. Integrasi Konsep Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme

Moderasi beragama dan multikulturalisme memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam. Integrasi kedua konsep ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial, serta mencegah konflik berbasis agama atau etnis.²⁰ Hal ini sangat penting mengintegrasikan moderasi beragama dan multikulturalisme, serta manfaat yang dapat diperoleh dari

¹⁵ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134–47, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.

¹⁶ Alfindo Alfindo, "Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 242, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4427>.

¹⁷ Anastasya Sembiring et al., "Rekonstruksi Identitas Gender Dalam Masyarakat Multikultural," *Public Service and Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 129–37, <https://doi.org/10.56444/psgi.v5i2.1495>.

¹⁸ Regita Damopolii and Alfian Erwinsyah, "Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Peserta Didik," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 86–105, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1111>.

¹⁹ Efit Fitria Agustianty, "Multikulturalisme Di Indonesia," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1–7.

²⁰ Abdon Arnolus Amtiran and Arimurti Kriswibowo, "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 331–48, <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.

penggabungan kedua konsep ini, baik di tingkat kebijakan maupun dalam kehidupan sehari-hari

3. Pendekatan Pendidikan dalam Mengintegrasikan Moderasi Beragama dan Multikulturalisme

Pendidikan memegang peranan kunci dalam membentuk sikap moderat dan inklusif di kalangan masyarakat. Kurikulum yang menggabungkan prinsip-prinsip moderasi beragama dan multikulturalisme dapat membangun generasi muda yang menghargai perbedaan dan menolak ekstremisme.²¹ Lembaga pendidikan dapat memainkan peran dalam mengintegrasikan kedua konsep ini, baik melalui pengajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip moderasi beragama dan multikulturalisme dapat menjadi dasar pembentukan karakter siswa yang menghargai keberagaman. Dalam pendidikan agama, misalnya, materi pembelajaran dapat difokuskan pada ajaran-ajaran yang mendorong toleransi, penghargaan terhadap sesama, serta penolakan terhadap sikap ekstremis. Pendidikan agama yang moderat harus menekankan bahwa beragama tidak berarti harus menolak atau memusuhi orang yang berbeda keyakinan.²²

Di sisi lain, pendidikan multikulturalisme juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum sosial dan kebangsaan, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia.²³ Dalam pembelajaran ini, para siswa dibimbing untuk menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia, serta bagaimana keberagaman ini dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan anti-diskriminasi juga dapat memperkuat konsep multikulturalisme di kalangan siswa.

Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan moderasi beragama dan multikulturalisme adalah pembelajaran berbasis nilai, di mana siswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas.²⁴ Pendekatan ini dapat dilakukan melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan permainan peran (*role-playing*) yang memungkinkan siswa untuk merasakan bagaimana pentingnya menghormati perbedaan.

²¹ Irmawati Irmawati and Dina Mardiana, "Pendidikan Multikultural Paradigma Moderasi Beragama Perspektif Imam Al-Ghazali," *Hikmah* 21, no. 1 (2024): 35–47, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v21i1.366>.

²² Rahma Khoirunnissa, "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).

²³ Zurni Rizqiyati et al., "Pendidikan Multikultural Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 195–222, <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.

²⁴ Syahrul Sitorus Laila Wardati, Darwis Margolang, "Pembelajaran Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama :," *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 175–87.

Selain itu, pengembangan kemampuan dialog antarbudaya dan antaragama juga penting. Dalam lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa dari beragam latar belakang agama dan budaya, seperti diskusi lintas agama atau proyek kolaboratif antar sekolah dengan keragaman agama, dapat memupuk sikap saling menghargai dan memahami. Melalui dialog terbuka, siswa akan belajar untuk mendengar perspektif lain dan merespons dengan sikap empati serta saling menghormati.²⁵ Peran guru sangat krusial dalam menerapkan pendekatan pendidikan yang mendukung integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan guru harus menekankan pentingnya pengajaran moderasi dan toleransi. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan moderasi dan penghargaan terhadap keragaman.

Pelatihan guru tentang teknik mengelola kelas yang multikultural, mengatasi potensi konflik, serta mendorong dialog yang sehat antar siswa dengan latar belakang yang berbeda perlu menjadi bagian dari program pendidikan guru. Selain itu, guru juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang cara menangani isu-isu intoleransi atau diskriminasi yang mungkin muncul di kelas atau lingkungan sekolah.²⁶ Selain melalui kurikulum formal, pendidikan tentang moderasi beragama dan multikulturalisme juga bisa diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan sosial.²⁷ Kegiatan seperti perayaan hari besar lintas agama, festival budaya, bakti sosial, atau kegiatan gotong royong antar komunitas agama dan suku dapat membantu siswa lebih memahami dan menghargai keberagaman. Program pertukaran pelajar lintas daerah atau lintas agama juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Dengan mengalami langsung kehidupan di lingkungan yang berbeda, siswa dapat memperluas wawasan mereka dan belajar untuk lebih terbuka terhadap perbedaan.

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan moderasi beragama dan multikulturalisme. Platform pembelajaran daring dapat digunakan untuk menyediakan akses kepada materi-materi pembelajaran yang

²⁵ Anif Istianah, Bunyamin Maftuh, and Elly Malihah, "Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar," *Jurnal Education and Development* 11, no. 3 (2023): 333–42, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5048>.

²⁶ Kusnadi Kusnadi and Nisa Arafiah Tri Wulandari, "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024): 539–51, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>.

²⁷ Rudi Ahmad Suryadi, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam," *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>.

mempromosikan toleransi dan keragaman budaya.²⁸ Selain itu, media sosial dapat menjadi ruang untuk kampanye dan diskusi tentang pentingnya moderasi dan multikulturalisme, meskipun perlu diwaspadai juga potensi penyebaran konten yang bersifat intoleran. Aplikasi berbasis permainan (*game-based learning*) juga bisa menjadi alat yang menarik bagi siswa untuk belajar mengenai keberagaman dengan cara yang menyenangkan. Melalui simulasi dan tantangan dalam permainan, siswa bisa belajar untuk mengambil keputusan yang moderat dan inklusif dalam menghadapi berbagai situasi sosial.²⁹

Kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, agama, dan sosial bisa membantu memperkuat integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme.³⁰ sehingga sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perdamaian atau dialog antaragama untuk menyelenggarakan program pendidikan toleransi. Institusi pendidikan juga dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan program pendidikan yang dirancang khusus untuk mempromosikan moderasi dan multikulturalisme.³¹ Perguruan tinggi dapat menyediakan beasiswa atau program studi yang fokus pada kajian multikulturalisme dan moderasi beragama, sehingga menghasilkan tenaga ahli yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas pendekatan pendidikan ini, penting bagi institusi pendidikan untuk memiliki mekanisme evaluasi yang baik. Pengukuran dan evaluasi dapat dilakukan melalui survei sikap siswa terhadap keberagaman sebelum dan sesudah mengikuti program pendidikan ini.³² Selain itu, pengamatan langsung oleh guru terhadap perilaku siswa di dalam kelas dan di luar sekolah dapat memberikan gambaran tentang dampak pendekatan pendidikan ini dalam jangka panjang. Evaluasi yang baik akan

²⁸ Dede Ahmad Muhtarom et al., "Suplemen Toleransi Pada Materi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Sekolah Menengah Pertama," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 666–79, <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2281>.

²⁹ Ardi Afriansyah, Dikdik Baehaqi Arif, and Kireida Rona Islam, "Development of Civics Learning through COLAKTRA (Congklak Nusantara) Innovation as a Traditional Game-Based Learning Media," *Journal of Insan Mulia Education* 2, no. 1 (2024): 10–18, <https://doi.org/10.59923/joinme.v2i1.93>.

³⁰ Aep Kusnawan and Ridwan Rustandi, "Menemukan Moderasi Beragama Dalam Kaderisasi Dakwah: Kajian Pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2021): 41–61, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2900>.

³¹ Rustam Ependi, Charles Rangkuti, and Ismaraidha, "Pelaksanaan Kurikulum Islam Wasathiyah Terhadap Muatan Pendidikan Moderatisme Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak MAS Tarbiyah Islamiyah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 4875–85.

³² Dinda Maharani and Mavianti Mavianti, "Analisis Terhadap Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Mata Pelajaran Agama Islam Pada Sekolah Musleeminsuksa School Songkhla Hatyai Thailand," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 328–41.

membantu dalam memperbaiki program dan pendekatan pendidikan sehingga lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme.

4. Kebijakan Publik Untuk Mengintegrasikan Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme

Kebijakan publik yang inklusif dan adil dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk penerapan moderasi beragama dan multikulturalisme.³³ Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang mendukung nilai-nilai moderasi dan menghormati keragaman budaya.³⁴ Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme di tengah masyarakat yang beragam.³⁵ Pemerintah, melalui berbagai regulasi dan program, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi toleransi beragama dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Kebijakan publik yang inklusif tidak hanya membantu menjaga stabilitas sosial tetapi juga memperkuat kohesi nasional. Beberapa aspek penting dalam kebijakan publik untuk mengintegrasikan moderasi beragama dan multikulturalisme meliputi:

a. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kurikulum pendidikan harus mencakup pembelajaran yang menekankan pentingnya sikap moderat dalam beragama dan menghargai perbedaan budaya.³⁶ Pendidikan Agama, misalnya, harus menyoroti nilai-nilai moderasi, toleransi, dan keadilan dalam beragama, sementara mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus mendorong penghargaan terhadap keragaman budaya, adat, dan agama. Kebijakan publik juga perlu mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi guru untuk mengajarkan konsep moderasi beragama dan multikulturalisme.³⁷ Guru harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara mendidik siswa untuk hidup damai di tengah perbedaan, serta bagaimana menanggapi masalah-masalah intoleransi di kelas.

Selain pendidikan formal, kebijakan publik harus mendukung pendidikan non-formal yang berfokus pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme. Pemerintah dapat mengembangkan program-program masyarakat seperti pelatihan dan seminar di kalangan pemuda dan komunitas lokal yang berfungsi

³³ M Mukhibat, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah, "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 73–88, <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>.

³⁴ Article Info, "Peran Strategis Widyaiswara Dalam Corporate University Untuk Pengembangan Smart ASN Berbasis Moderasi Beragama," no. 105 (n.d.): 176–90.

³⁵ Amtiran and Kriswibowo, "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama."

³⁶ Jalaludin Assayuthi, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural," *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 5, no. 2 (2020): 240–54, <https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.8336>.

³⁷ K Khaeroni, "Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Dalam Bidang Moderasi Beragama Melalui Pelatihan Di Wilayah Kerja (Pdwk) Dan ...," *Transformasi*, 2022, 1–23.

untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menolak ekstremisme.³⁸

b. Regulasi Anti-Diskriminasi dan Perlindungan Hak Asasi

Untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme, pemerintah perlu memiliki regulasi yang tegas dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok dari diskriminasi berbasis agama, suku, dan budaya.³⁹ Regulasi ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan mempromosikan kesetaraan di tengah keragaman masyarakat. Beberapa kebijakan penting yang perlu diterapkan. Pemerintah perlu memperkuat atau memberlakukan undang-undang yang secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau etnis.⁴⁰ Undang-undang ini harus mencakup sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan diskriminatif, serta menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi korban diskriminasi untuk mencari keadilan.⁴¹

Kebijakan yang melindungi kelompok minoritas agama dan etnis sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama.⁴² Pemerintah harus memiliki kebijakan yang melindungi minoritas dari tindakan kekerasan, persekusi, atau marginalisasi, serta menyediakan ruang untuk mereka berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

c. Program Dialog Antaragama dan Lintas Budaya

Untuk mendorong pemahaman antaragama dan antarbudaya, kebijakan publik harus mempromosikan dialog lintas agama dan budaya.⁴³ Program-program ini tidak hanya membantu memecahkan ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Beberapa langkah kebijakan dalam hal ini.

Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan forum dialog antaragama di tingkat lokal dan nasional, di mana para pemimpin agama dan masyarakat dapat

³⁸ Saripah Faiza Nur Khalida, Kaesul Ma'arif2, "KONTRIBUSI NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA Faiza," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 15, no. 1 (2024): 37–48.

³⁹ Babun Najib and Moh Rokib, "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al- Qur'an," *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 1 (2024): 12 hlm, <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/index>.

⁴⁰ Nindra Wahyu Hapsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 28.

⁴¹ Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>.

⁴² Muhammad Zaki et al., "Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 558–69, <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.4179>.

⁴³ Dita ; Ritonga Muhammad Husni Khairiza, "Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Antarumat Beragama Di Kota Medan," *Reslaj* 5, no. 6 (2023): 3283–95, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1047>.

berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan kehidupan beragama dan sosial. Forum ini harus menjadi ruang di mana terjadi pertukaran ide, pembelajaran, dan penyelesaian konflik secara damai.⁴⁴ Selain dialog antaragama, lembaga-lembaga kebudayaan yang mendorong pertemuan lintas budaya juga perlu didukung. Lembaga ini dapat berperan sebagai penghubung antara berbagai kelompok budaya dan mempromosikan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk seni, pendidikan, dan aktivitas sosial.⁴⁵

Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi yang inklusif untuk mendukung integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sering kali menjadi pemicu konflik berbasis agama dan etnis.⁴⁶ Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong kesetaraan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan layanan publik tanpa diskriminasi menjadi sangat penting. Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok agama dan etnis memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.⁴⁷ Layanan-layanan ini harus bebas dari diskriminasi, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Pemerintah perlu mengembangkan program-program ekonomi yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok minoritas agama dan etnis, termasuk memberikan pelatihan keterampilan, akses modal, dan peluang usaha. Pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesetaraan sosial yang lebih baik di tengah masyarakat yang beragam.⁴⁸ Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik.⁴⁹ Oleh karena itu, kebijakan publik harus memastikan bahwa media digunakan sebagai alat untuk mempromosikan moderasi beragama dan multikulturalisme, bukan untuk menyebarkan intoleransi dan radikalisme. Beberapa kebijakan yang dapat diambil.

Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang ketat terhadap media, baik media tradisional maupun digital, untuk mencegah penyebaran konten yang bersifat

⁴⁴ Haerul Latipah and Nawawi Nawawi, "Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Masyarakat," *Al-Israq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 21–42.

⁴⁵ Gunawan Santoso et al., "Kajian Identitas Nasional Melalui Misi Bendera Merah Putih Dan Bahasa Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 284–96.

⁴⁶ Muhamad Zuldin, "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer," *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): 157–83, <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.

⁴⁷ Zaki et al., "Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia."

⁴⁸ Jannes Eduard Sirait and Leorince Leorince, "INSTITUSI PENDIDIKAN KRISTEN SEBAGAI PILAR KEMERDEKAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA" 9, no. 2 (2024).

⁴⁹ Rila Kusumaningsih, "Rila Kusumaningsih" 2, no. 1 (2023): 9–22.

ekstremis, radikal, atau diskriminatif.⁵⁰ Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik. Pemerintah dapat menginisiasi kampanye publik yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, maupun iklan layanan masyarakat.⁵¹ Pesan-pesan yang disampaikan harus menekankan pentingnya toleransi, dialog, dan kerja sama lintas agama dan budaya.

Ruang publik, baik fisik maupun digital, dapat menjadi sarana untuk memperkuat interaksi antaragama dan antarbudaya.⁵² Pemerintah dapat membangun taman, pusat komunitas, atau pusat kebudayaan yang dirancang sebagai ruang inklusif di mana berbagai kelompok agama dan budaya dapat berinteraksi dan berkolaborasi. Ruang publik ini juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan lintas agama dan budaya yang mempromosikan kerjasama dan saling pengertian. Kebijakan yang memastikan akses setara ke teknologi dan informasi bagi semua kelompok agama dan etnis juga penting. Dengan akses yang setara, semua kelompok dapat berpartisipasi dalam diskusi dan memperoleh informasi yang relevan tentang toleransi dan moderasi, serta terlibat dalam platform dialog digital.

C. Penutup

Pendekatan pendidikan dalam mengintegrasikan moderasi beragama dan multikulturalisme menjadi strategi kunci dalam membentuk generasi yang inklusif dan toleran. Melalui kurikulum yang inklusif, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis teknologi, pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai tersebut secara efektif. Dukungan kebijakan publik, seperti regulasi anti-diskriminasi dan program dialog, berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan menciptakan masyarakat harmonis. Di Madura, integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme memiliki peluang besar karena didukung oleh tradisi keagamaan yang kuat dan kearifan lokal. Pesantren, tokoh agama, pemerintah, media, serta peran aktif perempuan dan generasi muda menjadi elemen strategis dalam implementasinya. Penerapan konsep ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga

⁵⁰ M Patora, "Agama Dan Dehumanisasi: Mengembangkan Spiritualitas Humanis Melalui Hidup Menggereja Di Era Disrupsi Digital," *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama ...* 10, no. 1 (2023): 252–63.

⁵¹ Maryam Siti, "Pengaruh Kampanye Imunisasi Measles Rubella Melalui Iklan Melalui Iklan Layanan Masyarakat Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terhadap Prilaku Masyarakat," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

⁵² Maulida Ulfa, "Maintaining Religious Moderation in the Digital Age: Challenges and Strategies for Facing Technology," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3, no. 1 (2024): 43–63.

menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif, memungkinkan masyarakat Madura mengelola keberagaman dengan bijaksana.

Referensi

- Agustianty, Efit Fitria. "Multikulturalisme Di Indonesia." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1–7.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Alfindo, Alfindo. "Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 242. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4427>.
- Amtiran, Abdon Arnolus, and Arimurti Kriswibowo. "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 331–48. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>.
- Anastasya Sembiring, Sri Yunita, Debora Matanari, Putriani Sinaga, and Yakinda Munthe. "Rekonstruksi Identitas Gender Dalam Masyarakat Multikultural." *Public Service and Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 129–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1495>.
- Ardi Afriansyah, Dikdik Baehaqi Arif, and Kireida Rona Islam. "Development of Civics Learning through COLAKTRA (Congklak Nusantara) Innovation as a Traditional Game-Based Learning Media." *Journal of Insan Mulia Education* 2, no. 1 (2024): 10–18. <https://doi.org/10.59923/joinme.v2i1.93>.
- Assayuthi, Jalaludin. "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 5, no. 2 (2020): 240–54. <https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.8336>.
- Barella, Yusawinur, Ana Fergina, Andi Achruh, and Hifza Hifza. "Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam: Membangun Kesadaran Dan Toleransi Dalam Keanekaragaman Budaya." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2028–39. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.476>.
- Damopolii, Regita, and Alfian Erwinsyah. "Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Peserta Didik." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 86–105. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1111>.
- Dwiyani, Aryanti. "Pendidikan Islam Multikultural Di Sekolah." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 68–78. <https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1586>.
- Ependi, Rustam, Charles Rangkuti, and Ismaraidha. "Pelaksanaan Kurikulum Islam Wasathiyah Terhadap Muatan Pendidikan Moderatisme Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak MAS Tarbiyah Islamiyah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 4875–85.
- Faiqah, Nurul, and Toni Pransiska. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>.
- Faiza Nur Khalida, Kaesul Ma'arif, Saripah. "KONTRIBUSI NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA Faiza." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Hapsari, Nindra Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)." *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 28.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23.
- Hasdiana, Ulva. "Epistemologi Hukum Islam." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.
- Heni Maria et al. "Transformasi Sosial Melalui Lensa Teologi : Memahami Peran Agama Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Pada Konteks Kontemporer." *Jurnal Teologi Dan*

- Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 108.
- Info, Article. "Peran Strategis Widyaiswara Dalam Corporate University Untuk Pengembangan Smart ASN Berbasis Moderasi Beragama," no. 105 (n.d.): 176–90.
- Irmawati, Irmawati, and Dina Mardiana. "Pendidikan Multikultural Paradigma Moderasi Beragama Perspektif Imam Al-Ghazali." *Hikmah* 21, no. 1 (2024): 35–47. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v21i1.366>.
- Istianah, Anif, Bunyamin Maftuh, and Elly Malihah. "Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar." *Jurnal Education and Development* 11, no. 3 (2023): 333–42. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5048>.
- Khaerani, K. "Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Dalam Bidang Moderasi Beragama Melalui Pelatihan Di Wilayah Kerja (Pdwk) Dan" *Transformasi*, 2022, 1–23.
- Khairiza, Dita ; Ritonga Muhammad Husni. "Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Antarumat Beragama Di Kota Medan." *Reslaj* 5, no. 6 (2023): 3283–95. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1047>.
- Khoirunnissa, Rahma. "Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).
- Kusnadi, Kusnadi, and Nisa Arafiah Tri Wulandari. "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024): 539–51. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>.
- Kusnawan, Aep, and Ridwan Rustandi. "Menemukan Moderasi Beragama Dalam Kaderisasi Dakwah: Kajian Pada Pemuda Persatuan Islam Jawa Barat." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2021): 41–61. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i1.2900>.
- Kusumaningsih, Rila. "Rila Kusumaningsih" 2, no. 1 (2023): 9–22.
- Laila Wardati, Darwis Margolang, Syahrul Sitorus. "Pembelajaran Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama :." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 175–87.
- Latipah, Haerul, and Nawawi Nawawi. "Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Masyarakat." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2023): 21–42.
- Lubis, P. "Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison ...* 1, no. 1 (2024): 314–32.
- Maharani, Dinda, and Mavianti Mavianti. "Analisis Terhadap Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Mata Pelajaran Agama Islam Pada Sekolah Musleeminsuksa School Songkhla Hatyai Thailand." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 328–41.
- Muhtarom, Dede Ahmad, Nopri Dwi Siswanto, Ulil Amri, and Akhmad Alim. "Suplemen Toleransi Pada Materi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Sekolah Menengah Pertama." *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 666–79. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2281>.
- Mukhibat, M, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah. "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>.
- Munadlir, Agus. "Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural." *JPSD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 2, no. 2 (2016): 6.
- Murzal. "Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SEKOLAH (Studi Terhadap Upaya Membina Karakter Siswa Di SMKN 1 Gerung Kec. Gerung Kab. Lombok Barat) Murzal." *Jurnal Kalam* 6, no. 2 (2018): 2338–41.
- Najib, Babun, and Moh Rokib. "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al- Qur' an." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 1 (2024): 12 hlm. <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/index>.

- Patora, M. “Agama Dan Dehumanisasi: Mengembangkan Spiritualitas Humanis Melalui Hidup Menggereja Di Era Disrupsi Digital.” *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama ...* 10, no. 1 (2023): 252–63.
- Rini, Nicken Sarwo. “Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan.” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>.
- Rizqiyati, Zurni, Riski Kurniawan, Mahfida Inayati, and Zainuddin Syarif. “Pendidikan Multikultural Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.” *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2024): 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya Sapriya, and Ma'mun Murod. “Kajian Identitas Nasional Melalui Misi Bendera Merah Putih Dan Bahasa Indonesia Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 284–96.
- Sirait, Jannes Eduard, and Leorince Leorince. “INSTITUSI PENDIDIKAN KRISTEN SEBAGAI PILAR KEMERDEKAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA” 9, no. 2 (2024).
- Siti, Maryam. “Pengaruh Kampanye Imunisasi Measles Rubella Melalui Iklan Melalui Iklan Layanan Masyarakat Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terhadap Prilaku Masyarakat.” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.
- Sitompul, Baginda, Daniel FN Hutabarat, Dewi Clara Simanjuntak, Jenni Asri, and Bella Priskilla br Sitepu. “Peran Pendidikan Dalam Menjaga Keharmonisan Beragama Di Indonesia: Perspektif Pluralitas Agama.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 02 (2024): 3031–9498.
- Suryadi, Rudi Ahmad. “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam.” *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.17509/tk.v20i1.43544>.
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Taufiq, Firmanda, and Ayu Maulida Alkholid. “Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134–47. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.
- Ulfa, Maulida. “Maintaining Religious Moderation in the Digital Age: Challenges and Strategies for Facing Technology.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3, no. 1 (2024): 43–63.
- Yanto, Masti, Zeinal Abidin, St. Maizah, and Mahfida Inayati. “Pendidikan Karakter Berbasis Sistem Islamic Boarding School Multidisipliner Dalam Mempertahankan Kebudayaan Dan Moderasi Beragama.” *Lentera Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 23, no. 1 (2024): 130–45.
- . “Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural.” *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2023): 252–57. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1343>.
- Zaki, Muhammad, Daffa Rifqi Rafsanjani, Denis Andryan Hutabarat, Bima Hidayah, and Denny Oktavina Radianto. “Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 558–69. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.4179>.
- Zuldin, Muhamad. “Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer.” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): 157–83. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.